

BAB IV. Gambaran Umum Kota Jakarta Selatan

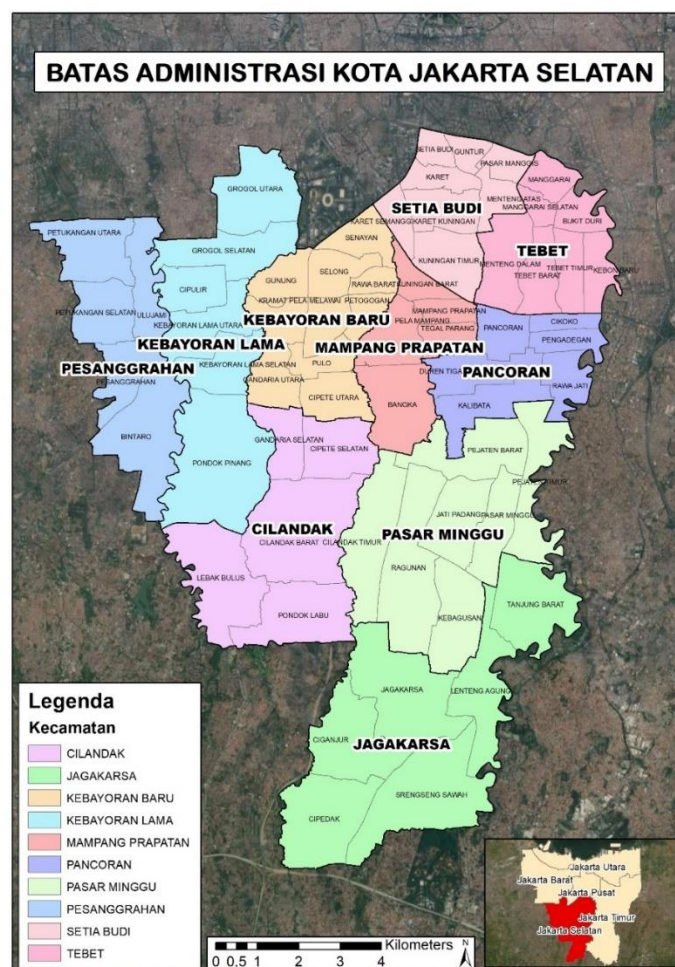
Pada bagian ini akan menjelaskan gambaran umum Kota Jakarta Selatan yang berhubungan dengan evaluasi aksesibilitas dari perspektif *15-minutes city*. Terdiri dari pembahasan mengenai administrasi, kondisi fisik, kependudukan, jaringan transportasi, penggunaan lahan, dan sebaran fasilitas. Penjelasan pada bagian ini digunakan sebagai input data dan informasi pada bagian selanjutnya yakni analisis data.

IV.1 Batas Administrasi Kota Jakarta Selatan

Kota Jakarta Selatan adalah salah satu dari lima kota administratif di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Wilayah ini terletak antara 6° 14' 0" hingga 6° 22' 0" Lintang Selatan dan antara 106° 45' 0" hingga 106° 55' 0" Bujur Timur, dengan luas total sekitar 145,73 kilometer persegi. Jakarta Selatan dikenal sebagai wilayah yang memadukan area bisnis, permukiman, dan kawasan hijau. Selain itu, Jakarta Selatan memainkan peran penting sebagai salah satu pusat ekonomi dan sosial di DKI Jakarta, serta menjadi bagian strategis dalam pergerakan ekonomi di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Jakarta Selatan terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan dengan rincian detail sebagai berikut:

1. Kecamatan Cilandak dengan luas kurang lebih 2.681 ha terdiri dari 5 kelurahan
2. Kecamatan Jagakarsa dengan luas kurang lebih 2.524 ha terdiri dari 6 kelurahan
3. Kecamatan Kebayoran Baru dengan luas kurang lebih 771 ha terdiri dari 10 kelurahan
4. Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas kurang lebih 1.740 ha terdiri dari 6 kelurahan
5. Kecamatan Mampang Prapatan dengan luas kurang lebih 793 ha terdiri dari 5 kelurahan
6. Kecamatan Pancoran dengan luas kurang lebih 841 ha terdiri dari 6 kelurahan

7. Kecamatan Pasar Minggu dengan luas kurang lebih 2.507 ha terdiri dari 7 kelurahan
8. Kecamatan Pesanggrahan dengan luas kurang lebih 1.700 ha terdiri dari 5 kelurahan
9. Kecamatan Setiabudi dengan luas kurang lebih 643 ha terdiri dari 8 kelurahan
10. Kecamatan Tebet dengan luas kurang lebih 935 ha terdiri dari 7 kelurahan



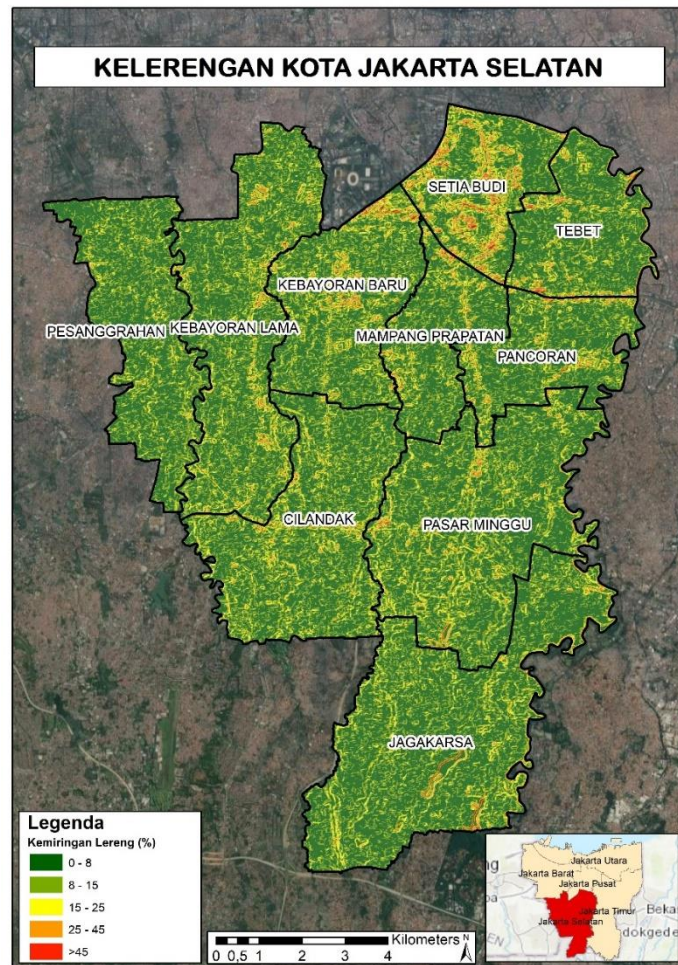
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kota Jakarta Selatan
 Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Secara batas administrasi, Kota Jakarta Selatan berada di bagian selatan Daerah Keistimewaan Ibukota Jakarta yang dikelilingi beberapa kabupaten dan kota, batas-batas administrasi Kota Jakarta Selatan meliputi:

- Sebelah Utara : Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Barat
- Sebelah Timur : Kota Jakarta Timur
- Sebelah Selatan : Kota Depok, Jawa Barat
- Sebelah Barat : Kota Tangerang Selatan, Banten

IV.2 Kondisi Topografi dan Kelerengan Kota Jakarta Selatan

Dalam sudut pandang konsep 15-minute city di Jakarta Selatan, kondisi topografi dan kelerengan wilayah menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam mengevaluasi aksesibilitas dan proximity terhadap fasilitas publik. Wilayah Jakarta Selatan, yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah namun juga memiliki beberapa daerah dengan kontur tanah yang lebih tinggi, seperti di kawasan perbukitan kecil, dapat menjadi tantangan dalam memastikan konektivitas yang efisien. Topografi yang beragam mempengaruhi efisiensi infrastruktur transportasi dan aksesibilitas terhadap layanan publik. Di daerah dengan kelerengan yang lebih curam akan lebih sulit untuk menyediakan akses yang mudah bagi pejalan kaki dan pesepeda. Keterbatasan ini harus diperhitungkan ketika melihat dari sudut pandang konsep kota 15 menit, di mana tujuan utama adalah memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan ruang terbuka hijau, dalam radius 15 menit berjalan kaki atau bersepeda. Sebaliknya, di area datar tantangan geografis lebih rendah sehingga penerapan konsep ini lebih mudah dan lebih efisien.



Gambar 4. 2 Peta Kemiringan Lereng Jakarta Selatan
Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DEMNAS

Tabel 4. 1 Klasifikasi Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng	Klasifikasi	Luas (Ha)
0 - 8%	Datar	7684,95
8 - 15%	Landai	4854,53
15 - 25%	Agak Curam	1451,56
25 - 45%	Curam	378,34

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas wilayah Jakarta Selatan didominasi oleh lereng dengan kemiringan datar (0-8%) yang mencakup luas wilayah sebesar 7.684,95 hektar. Wilayah ini memiliki potensi besar untuk pengembangan pemukiman dan infrastruktur perkotaan karena topografi datar memudahkan

pembangunan serta mendukung mobilitas pejalan kaki. Dominasi kawasan dengan kemiringan datar memberikan kemudahan dalam perencanaan tata kota yang berorientasi pada *walkability*. Selanjutnya, wilayah dengan kemiringan antara 8-15% atau yang dikategorikan sebagai landai mencakup luas 4.854,53 hektar. Wilayah ini masih memungkinkan pengembangan yang relatif mudah, meskipun ada tantangan dalam memastikan aksesibilitas yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki, terutama di lokasi dengan kemiringan sedikit lebih tinggi.

Pemahaman menyeluruh mengenai pola distribusi kemiringan lereng di Jakarta Selatan menjadi penting dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada keterjangkauan berjalan kaki (*walkability*). Dengan mempertimbangkan topografi beragam ini, pengembangan wilayah harus memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan aksesibilitas bagi penduduk, khususnya dalam perspektif konsep kota 15 menit (*15-Minute City*) di mana setiap kebutuhan warga dapat diakses dalam jarak berjalan kaki atau bersepeda yang singkat dari tempat tinggal.

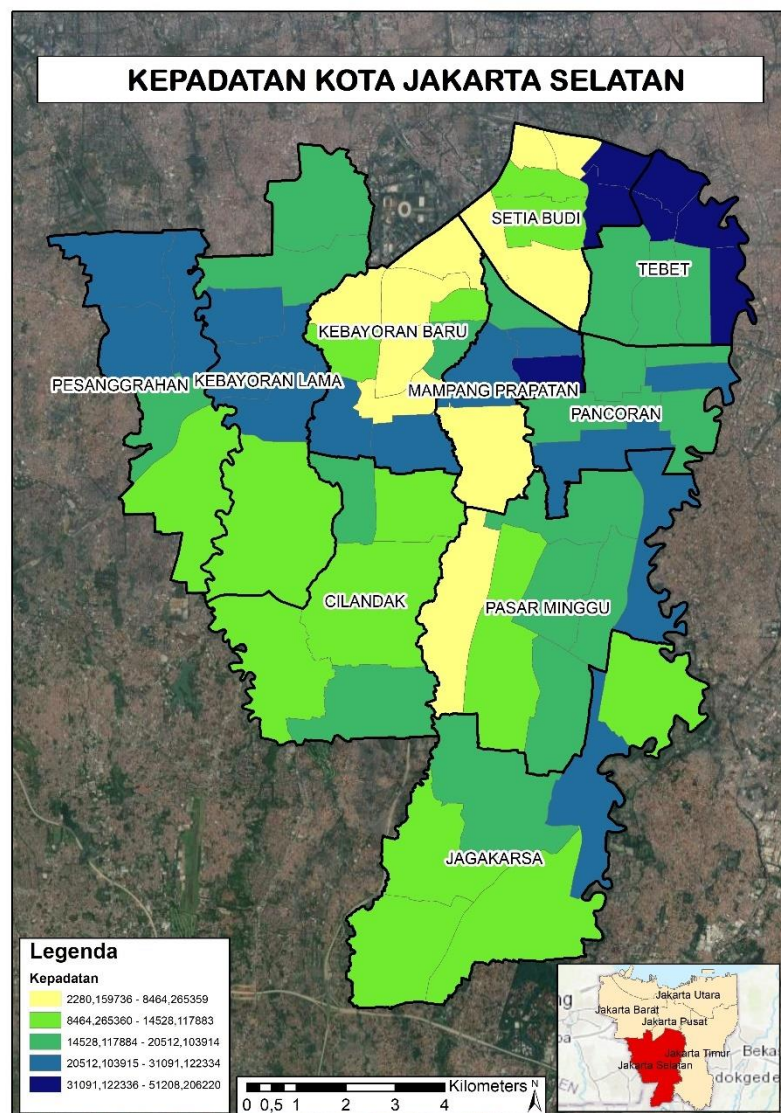
IV.3 Kependudukan Kota Jakarta Selatan

Kondisi kependudukan menjadi faktor penting yang mempengaruhi aksesibilitas, terutama dalam dimensi density (kepadatan penduduk). Dengan populasi yang terus meningkat di Jakarta Selatan, serta variasi kepadatan penduduk di berbagai kecamatan akibat urbanisasi dan migrasi, perlu dilakukan penyesuaian infrastruktur yang memperhatikan distribusi populasi agar aksesibilitas fasilitas publik dapat terjamin secara merata dan efisien.

Kepadatan penduduk yang tinggi memberikan tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu 15 menit berjalan kaki atau bersepeda. Semakin padat populasi di suatu area, semakin banyak fasilitas publik yang dibutuhkan, seperti sekolah, rumah sakit, ruang hijau, dan pusat transportasi. Hal ini menuntut adanya perencanaan infrastruktur yang lebih matang untuk memastikan aksesibilitas terhadap fasilitas publik tetap terjaga

meskipun terjadi peningkatan populasi yang signifikan di wilayah-wilayah tersebut.

Sebaliknya, di kecamatan dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah seperti Jagakarsa dan Pesanggrahan, jarak ke fasilitas publik mungkin lebih panjang, sehingga mempengaruhi efektivitas aksesibilitas berdasarkan konsep kota 15 menit. Dalam situasi ini, perlu dilakukan distribusi fasilitas yang lebih merata untuk menghindari ketimpangan aksesibilitas antara area padat dan kurang padat.



Gambar 4. 3 Peta Kepadatan Penduduk Jakarta Selatan
Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2024

Tabel 4. 2 Jumlah Kepadatan Penduduk per Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan (Jiwa/km persegi)
Cilandak	Cilandak Barat	63043	5,89	10700
	Lebak Bulus	46678	4,38	10653
	Pondok Labu	57832	3,49	16557
	Gandaria Selatan	27105	1,60	16952
	Cipete Selatan	32748	2,39	13712
Jagakarsa	Jagakarsa	79892	5,09	15709
	Srengseng Sawah	74061	5,55	13337
	Ciganjur	49709	3,65	13634
	Lenteng Agung	68245	3,16	21624
	Tanjung Barat	50552	3,57	14173
	Cipedak	49580	4,06	12221
Kebayoran Baru	Melawai	2956	1,28	2308
	Gunung	11231	1,42	7891
	Selong	3259	1,43	2282
	Rawa Barat	6653	0,66	10146
	Kramat Pela	17342	1,25	13885
	Senayan	3266	1,43	2280
	Pulo	6752	1,10	6115
	Petogogan	13912	0,85	16355
	Gandaria Utara	48594	1,56	31091
	Cipete Utara	42102	1,71	24638
Kebayoran Lama	Cipulir	49917	1,69	29496
	Grogol Utara	52931	3,31	16004
	Grogol Selatan	54944	2,88	19047
	Kebayoran Lama Selatan	50904	2,07	24585
	Kebayoran Lama Utara	53229	2,31	23027
	Pondok Pinang	70088	6,79	10318
Mampang Prapatan	Mampang Prapatan	22701	0,80	28551
	Bangka	26426	3,17	8324
	Pela Mampang	53422	1,95	27405
	Tegal Parang	40191	1,05	38436
	Kuningan Barat	15837	0,98	16220
Pancoran	Pengadegan	26696	0,97	27418
	Cikoko	12904	0,67	19380
	Pancoran	24550	1,40	17541
	Kalibata	52729	2,35	22400
	Rawa Jati	26122	1,48	17674
	Duren Tiga	34602	2,00	17289
Pasar Minggu	Pasar Minggu	30616	1,99	15374
	Jati Padang	46801	2,40	19513
	Cilandak Timur	31361	3,71	8464
	Ragunan	48969	4,77	10260
	Pejaten Timur	72678	2,89	25191
	Pejaten Barat	46351	3,08	15049

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan (Jiwa/km persegi)
	Kebagusan	57065	2,78	20512
Pesanggrahan	Pesanggrahan	34765	1,93	17975
	Bintaro	66555	4,58	14528
	Petukangan Utara	68081	2,81	24248
	Petukangan Selatan	47008	2,13	22035
	Ulujami	52076	2,04	25517
Setia Budi	Karet Semanggi	3304	0,90	3671
	Karet Kuningan	19502	1,69	11534
	Karet	11431	1,00	11402
	Menteng Atas	34101	1,05	32594
	Pasar Manggis	33324	0,78	42502
	Guntur	4603	0,65	7069
	Kuningan Timur	7257	2,17	3350
	Setia Budi	3540	0,68	5238
Tebet	Kebon Baru	43392	1,26	34380
	Bukit Duri	41973	1,08	39023
	Manggarai Selatan	28410	0,55	51208
	Manggarai	35552	1,06	33407
	Tebet Timur	21521	1,32	16261
	Tebet Barat	25590	1,64	15644
	Menteng Dalam	44652	2,43	18405

Kecamatan dengan kepadatan tertinggi di Jakarta Selatan adalah Tebet, dengan jumlah penduduk sebesar 241.090 jiwa dan luas wilayah 9,34 km², menghasilkan kepadatan sekitar 25.807 jiwa per km². Kepadatan ini mencerminkan tekanan luar biasa terhadap ruang publik dan infrastruktur di wilayah tersebut. Dalam konteks *walkability*, tingginya kepadatan penduduk di Tebet menuntut perhatian khusus pada pengembangan jalur pejalan kaki yang aman, nyaman, dan terhubung dengan baik antar-fasilitas. Penggunaan trotoar yang luas dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan agar mobilitas pejalan kaki tetap lancar, serta untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor yang dapat memperparah kemacetan dan polusi udara.

Selain Tebet, kecamatan-kecamatan seperti Pancoran, dengan kepadatan 20.017 jiwa per km², dan Mampang Prapatan, dengan kepadatan 19.969 jiwa per km², juga menunjukkan tantangan serupa. Kecamatan-kecamatan ini menghadapi beban kepadatan yang tinggi, sehingga perlu menyediakan fasilitas umum yang

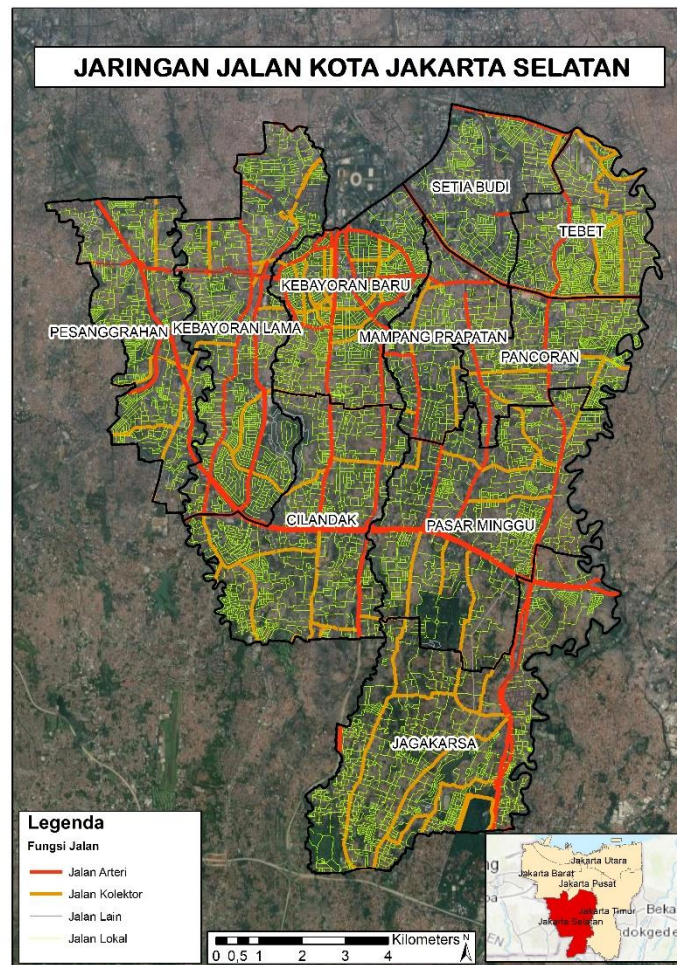
mudah diakses dan ruang terbuka hijau yang memadai untuk menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Dengan populasi yang padat, keberadaan jalur pejalan kaki yang aman dan ramah pengguna serta konektivitas yang efisien ke fasilitas seperti sekolah, pasar, dan pusat layanan kesehatan menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif.

Data kepadatan penduduk ini menunjukkan bahwa tingginya konsentrasi populasi di beberapa kecamatan di Jakarta Selatan memerlukan perencanaan yang berfokus pada keterjangkauan, efisiensi ruang, dan peningkatan infrastruktur publik. Dengan pendekatan yang tepat, kepadatan ini dapat menjadi peluang untuk membangun komunitas yang terhubung dengan baik, ramah lingkungan, dan mendukung kehidupan sosial yang dinamis.

IV.4 Jaringan Transportasi Kota Jakarta Selatan

Jaringan jalan merupakan elemen inti dalam penerapan konsep 15-minute city, khususnya dalam konteks pengukuran aksesibilitas di Jakarta Selatan. Kondisi jaringan jalan, terutama dalam hal ketersediaan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, sangat berperan penting dalam dimensi proximity (kedekatan). Dari sudut pandang proximity, jaringan jalan harus memastikan bahwa fasilitas-fasilitas penting seperti pusat kesehatan, sekolah, dan ruang terbuka hijau dapat diakses dalam waktu maksimal 15 menit dengan berjalan kaki atau bersepeda. Konektivitas antar jaringan jalan juga harus diperhatikan untuk memastikan kemudahan mobilitas dan akses cepat antar zona di Jakarta Selatan.

Dengan memastikan bahwa jaringan jalan di Jakarta Selatan mendukung aksesibilitas yang baik untuk pejalan kaki dan pesepeda, kota ini dapat mendekati tujuan konsep 15-minute city yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penataan dan pengelolaan yang tepat terhadap jaringan jalan akan memudahkan masyarakat untuk menjangkau berbagai fasilitas publik, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.



Gambar 4. 4 Peta Jaringan Jalan Jakarta Selatan
 Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Tabel 4. 3 Panjang tiap Fungsi Jalan di Jakarta Selatan

Fungsi Jalan	Panjang Jalan (Kilometer)
Jalan Lokal	1379,06
Jalan Kolektor	126,19
Jalan Arteri	191,01
Jalan Lain	27,18

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta

Sebaran jaringan jalan di Jakarta Selatan menjadi elemen penting dalam mendukung konektivitas, mobilitas penduduk, serta aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan data, total panjang jaringan jalan di Jakarta Selatan terdiri dari beberapa jenis fungsi, yaitu jalan arteri, kolektor, dan lokal, yang memiliki peran khusus dalam mendukung pergerakan barang, orang, dan

aktivitas sehari-hari. Jalan arteri, dengan panjang total 191,02 kilometer, berfungsi sebagai jalur utama yang menghubungkan kawasan-kawasan penting di Jakarta Selatan. Jalan ini menjadi koridor vital bagi pergerakan lalu lintas kendaraan dan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain.

Sementara itu, jaringan jalan kolektor memiliki panjang total 126,19 kilometer dan berfungsi sebagai penghubung antara jalan arteri dan jalan lokal. Jalan kolektor memainkan peran penting dalam mendistribusikan lalu lintas dari kawasan permukiman ke jalan utama dan sebaliknya, serta memastikan arus lalu lintas tetap lancar. Jalan ini juga menjadi jalur penting yang menghubungkan masyarakat dengan pusat kegiatan ekonomi, layanan publik, serta fasilitas umum lainnya.

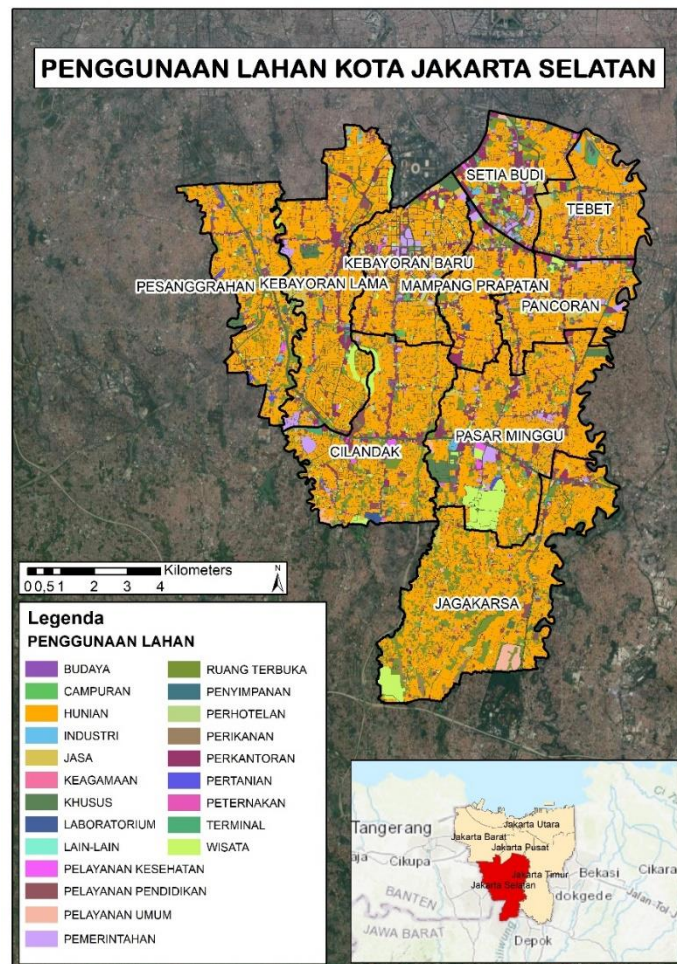
Jalan lokal, yang memiliki panjang total 1.379,07 kilometer, menyebar luas dan berfungsi untuk menghubungkan antar-lingkungan, serta menjadi akses menuju jalan kolektor dan jalan arteri. Jalan lokal berperan penting dalam menyediakan akses langsung ke permukiman, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan, serta mendukung mobilitas pejalan kaki di tingkat lingkungan. Dengan adanya jaringan jalan yang terintegrasi dan fungsional, Jakarta Selatan memiliki potensi untuk meningkatkan mobilitas warganya, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memperkuat aksesibilitas terhadap layanan dan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat sehari-hari.

IV.5 Penggunaan Lahan Kota Jakarta Selatan

Penggunaan lahan, khususnya sebaran permukiman, merupakan elemen kunci dalam penerapan konsep 15-minute city di Jakarta Selatan. Efisiensi dan perencanaan penggunaan lahan harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang optimal ke berbagai layanan dan fasilitas publik dalam jarak tempuh 15 menit dengan berjalan kaki atau bersepeda. Dalam dimensi proximity, sangat penting untuk memastikan bahwa zona permukiman berdekatan

dengan fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, ruang terbuka hijau, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum.

Penggunaan lahan yang tidak merata, seperti konsentrasi fasilitas di daerah-daerah tertentu dan minimnya layanan di daerah permukiman padat penduduk, dapat mengakibatkan ketimpangan dalam aksesibilitas. Oleh karena itu, distribusi layanan yang baik di sekitar area permukiman akan menciptakan lingkungan yang ramah penghuni dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Ini sejalan dengan tujuan konsep 15-minute city, yang bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi emisi karbon melalui mobilitas berkelanjutan.



Gambar 4. 5 Penggunaan Lahan Jakarta Selatan
Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Tabel 4. 4 Luasan Penggunaan Lahan Jakarta Selatan

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Budaya	20,11	0,15
Campuran	76,89	0,59
Hunian	7951,30	61,05
Industri	51,76	0,40
Jasa	316,32	2,43
Keagamaan	93,99	0,72
Khusus	154,40	1,19
Laboratorium	18,46	0,14
Lain-Lain	0,61	0,00
Pelayanan Kesehatan	75,87	0,58
Pelayanan Pendidikan	443,28	3,40
Pelayanan Umum	136,93	1,05
Pemerintahan	238,08	1,83
Ruang Terbuka	1728,76	13,27
Penyimpanan	36,76	0,28
Perhotelan	75,35	0,58
Perikanan	44,79	0,34
Perkantoran dan Perdagangan	880,23	6,76
Pertanian	35,01	0,27
Peternakan	1,33	0,01
Terminal	134,35	1,03
Wisata	509,59	3,91

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan identifikasi penggunaan lahan di Jakarta Selatan, lahan hunian menjadi jenis penggunaan lahan terbesar dengan luas mencapai 7.951,30 hektar, atau sekitar 61,05% dari total luas lahan. Hal ini menunjukkan kebutuhan tinggi akan tempat tinggal yang seiring dengan pertumbuhan populasi yang signifikan di wilayah tersebut. Dominasi lahan hunian mencerminkan pentingnya perencanaan perkotaan yang berfokus pada penyediaan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas umum, akses transportasi yang baik, dan ruang terbuka hijau, untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, ruang terbuka menempati posisi kedua dengan luas 1.728,76 hektar, yang setara dengan 13,27% dari total penggunaan lahan. Ruang terbuka ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menyediakan

area rekreasi, serta membantu mengurangi polusi udara di tengah kota yang padat. Penggunaan lahan untuk perkantoran dan perdagangan mencakup 880,23 hektar atau 6,76% dari total lahan, mencerminkan pentingnya sektor ekonomi dan layanan bisnis yang mendukung kegiatan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya area ini, Jakarta Selatan dapat memberikan akses mudah ke berbagai layanan dan peluang pekerjaan, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Penggunaan lahan yang bervariasi di Jakarta Selatan menciptakan keseimbangan antara hunian, ruang terbuka, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sosial dan pendidikan. Dengan perencanaan yang baik, berbagai fungsi lahan ini dapat dikelola secara efisien untuk mendukung pertumbuhan kota yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan di tengah pesatnya perkembangan perkotaan.

IV.6 Sebaran Fasilitas Publik di Kota Jakarta Selatan

Selain aksesibilitas jaringan jalan, sebaran dan ketersediaan fasilitas publik di Jakarta Selatan merupakan aspek penting dalam pengukuran aksesibilitas menggunakan konsep 15-minute city, khususnya dalam dimensi proximity dan diversity. Konsep 15-minute city berfokus pada lima jenis fasilitas utama yang harus tersedia secara merata dan mudah diakses oleh penduduk, yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, serta fasilitas rekreasi dan sosial. Dari segi proximity, sebaran fasilitas ini harus diperiksa untuk memastikan bahwa setiap zona permukiman di Jakarta Selatan memiliki akses yang merata terhadap fasilitas tersebut, dengan jarak tempuh maksimal 15 menit berjalan kaki atau bersepeda. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor dan mendukung mobilitas berkelanjutan di seluruh wilayah. Sebagai contoh, di beberapa kecamatan padat penduduk seperti Kebayoran Baru atau Pasar Minggu, sebaran fasilitas mungkin lebih terkonsentrasi di titik-titik tertentu, sehingga diperlukan distribusi yang lebih merata di kawasan permukiman lain.

Sementara itu, dimensi diversity menekankan pentingnya keberagaman fasilitas yang tersedia dalam radius 15 menit. Fasilitas yang beragam dan saling

terintegrasi akan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi mobilitas penduduk tanpa harus bergantung pada kendaraan bermotor. Keberagaman fasilitas dalam jarak yang dekat memungkinkan warga untuk memenuhi berbagai kebutuhan—seperti akses ke sekolah, rumah sakit, pasar, serta tempat rekreasi—dalam waktu singkat. Hal ini juga mendukung lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda, serta menciptakan ruang kota yang lebih inklusif dan sehat. Dengan mengukur sebaran dan keragaman fasilitas publik di Jakarta Selatan melalui pendekatan ini, penelitian dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan distribusi dan aksesibilitas, sehingga dapat mendukung terciptanya mobilitas yang lebih efisien, mengurangi polusi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

IV.6.1 Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Jakarta Selatan

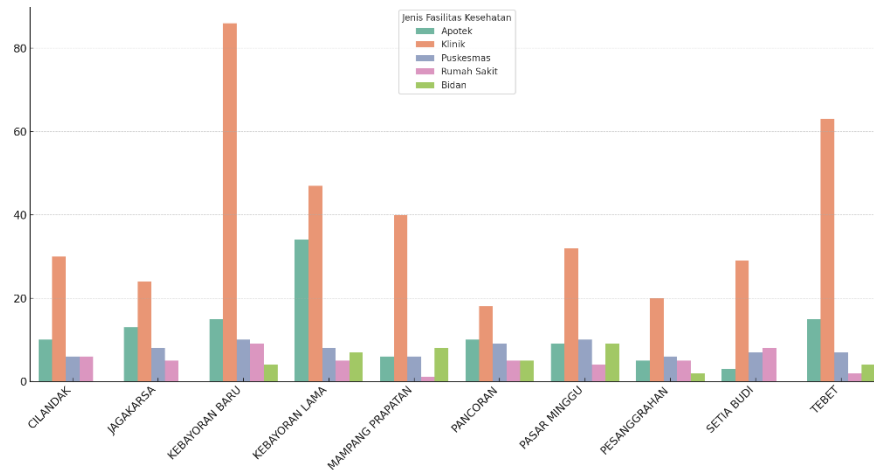
Sebaran fasilitas kesehatan di suatu wilayah menentukan tingkat aksesibilitas dan kualitas layanan yang dapat dinikmati masyarakat. Identifikasi dan analisis sebaran ini membantu memahami distribusi fasilitas seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek serta dampaknya pada akses pelayanan kesehatan. Hal ini penting untuk mengurangi disparitas akses dan memastikan setiap individu memiliki layanan kesehatan yang setara.

Tabel 4. 5 Sebaran Fasilitas Kesehatan di Jakarta Selatan

Kecamatan	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas
Cilandak	Apotek	10
	Klinik	30
	Puskesmas	6
	Rumah Sakit	6
Jagakarsa	Apotek	13
	Klinik	24
	Puskesmas	8
	Rumah Sakit	5
Kebayoran Baru	Apotek	15
	Bidan	4
	Klinik	86
	Puskesmas	10
	Rumah Sakit	9
Kebayoran Lama	Apotek	34
	Bidan	7

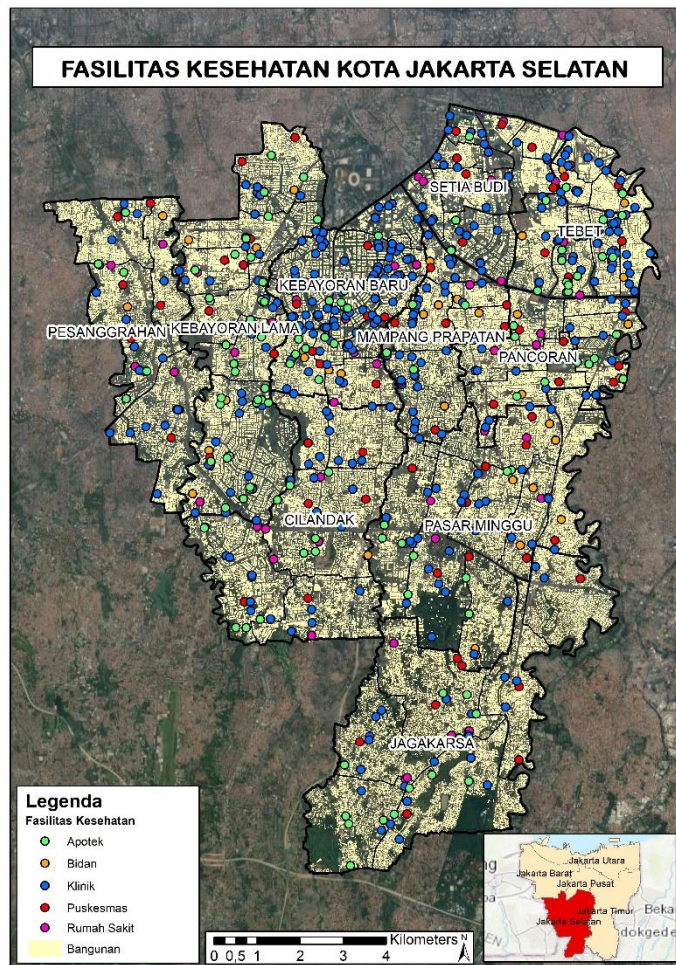
Kecamatan	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas
	Klinik	47
	Puskesmas	8
	Rumah Sakit	5
Mampang Prapatan	Apotek	6
	Bidan	8
	Klinik	40
	Puskesmas	6
	Rumah Sakit	1
Pancoran	Apotek	10
	Bidan	5
	Klinik	18
	Puskesmas	9
	Rumah Sakit	5
Pasar Minggu	Apotek	9
	Bidan	9
	Klinik	32
	Puskesmas	10
	Rumah Sakit	4
Pesanggrahan	Apotek	5
	Bidan	2
	Klinik	20
	Puskesmas	6
	Rumah Sakit	5
Setia Budi	Apotek	3
	Klinik	29
	Puskesmas	7
	Rumah Sakit	8
Tebet	Apotek	15
	Bidan	4
	Klinik	63
	Puskesmas	7
	Rumah Sakit	2

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023



Gambar 4. 6 Grafik Distribusi Fasilitas Kesehatan di Jakarta Selatan
 Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Data distribusi fasilitas kesehatan di Jakarta Selatan menunjukkan bahwa Kebayoran Baru merupakan kecamatan dengan jumlah fasilitas kesehatan terbanyak dan jenis fasilitas yang paling beragam. Dalam kecamatan ini terdapat 5 jenis fasilitas kesehatan yang mencakup berbagai tipe, mulai dari Apotek, Klinik, Puskesmas, dan Rumah Sakit, dengan total jumlah mencapai 124 fasilitas.



Gambar 4. 7 Sebaran Fasilitas Kesehatan di Jakarta Selatan
 Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Di sisi lain, Setia Budi merupakan kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas kesehatan paling sedikit, dengan total 47 fasilitas yang terbagi ke dalam 4 jenis fasilitas kesehatan. Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi fasilitas kesehatan di wilayah ini dibandingkan dengan kecamatan seperti Kebayoran Baru. Kecamatan dengan fasilitas lebih sedikit atau jenis yang kurang beragam menghadapi tantangan dalam memastikan akses layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh warganya. Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, prioritas kebijakan, dan daya tarik bagi investasi swasta dapat berperan dalam menentukan seberapa banyak fasilitas yang tersedia di wilayah tertentu.

IV.6.2 Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Jakarta Selatan

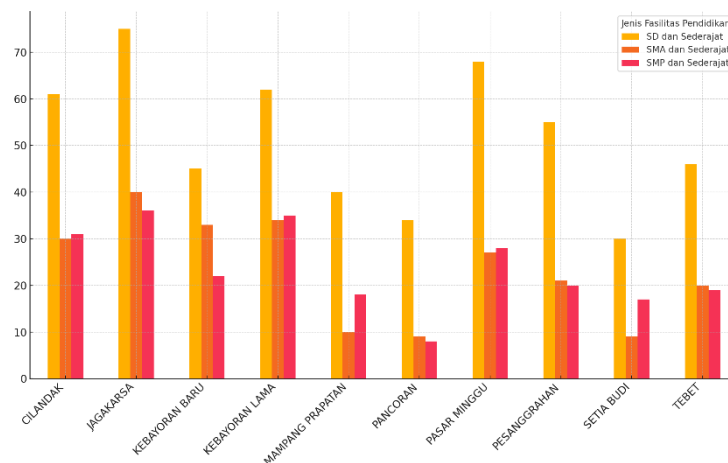
Sebaran fasilitas pendidikan di suatu wilayah memainkan peran penting dalam menentukan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat. Identifikasi sebaran ini bertujuan untuk memahami distribusi sekolah di berbagai tingkatan, seperti SD, SMP, dan SMA, serta bagaimana distribusi tersebut memengaruhi kesempatan pendidikan bagi siswa di setiap wilayah. Dengan mengetahui sebaran fasilitas pendidikan, dapat diidentifikasi potensi kesenjangan akses pendidikan dan kebutuhan perencanaan untuk meningkatkan pemerataan, sehingga setiap anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas.

Tabel 4. 6 Tabel Distribusi Fasilitas Pendidikan di Jakarta Selatan

Kecamatan	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas
Cilandak	SD dan Sederajat	61
	SMP dan Sederajat	30
	SMA dan Sederajat	31
Jagakarsa	SD dan Sederajat	75
	SMP dan Sederajat	40
	SMA dan Sederajat	36
Kebayoran Baru	SD dan Sederajat	45
	SMP dan Sederajat	33
	SMA dan Sederajat	22
Kebayoran Lama	SD dan Sederajat	62
	SMP dan Sederajat	34
	SMA dan Sederajat	35
Mampang Prapatan	SD dan Sederajat	40
	SMP dan Sederajat	10
	SMA dan Sederajat	18
Pancoran	SD dan Sederajat	34
	SMP dan Sederajat	9
	SMA dan Sederajat	8
Pasar Minggu	SD dan Sederajat	68
	SMP dan Sederajat	27
	SMA dan Sederajat	28
Pesanggrahan	SD dan Sederajat	55
	SMP dan Sederajat	21
	SMA dan Sederajat	20
Setia Budi	SD dan Sederajat	30

Kecamatan	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas
Tebet	SMP dan Sederajat	9
	SMA dan Sederajat	17
	SD dan Sederajat	46
	SMP dan Sederajat	20
	SMA dan Sederajat	19

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023



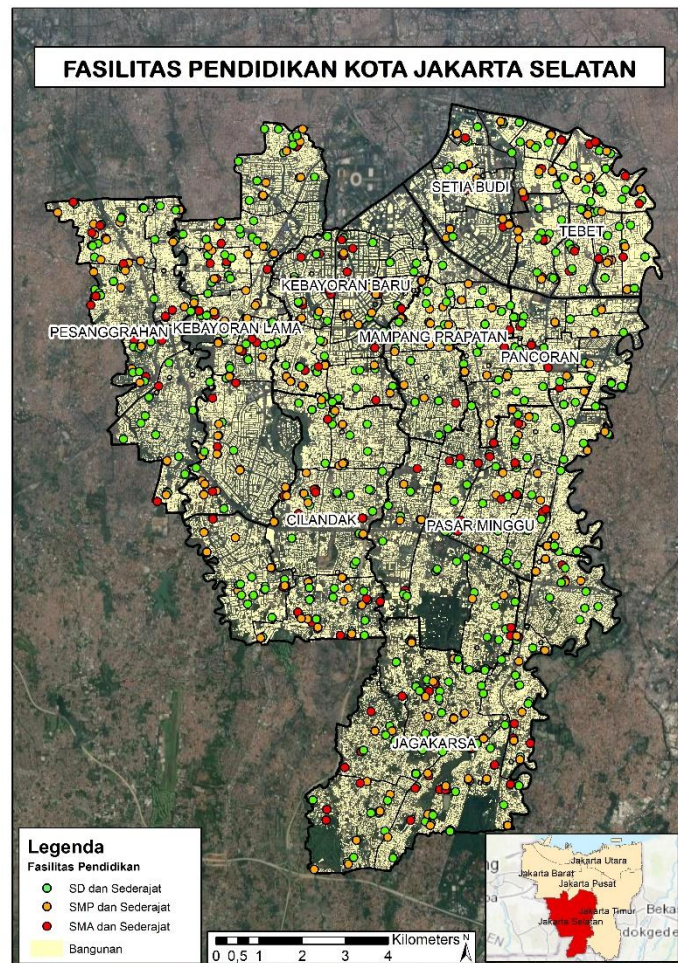
Gambar 4. 8 Grafik Distribusi Fasilitas Pendidikan di Jakarta Selatan

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan data sebaran fasilitas pendidikan di Jakarta Selatan, Jagakarsa menempati posisi sebagai kecamatan dengan jumlah fasilitas pendidikan terbanyak, dengan total 151 fasilitas yang tersebar di berbagai tingkatan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 75 fasilitas merupakan SD (Sekolah Dasar) dan sederajat. Selain itu, terdapat 36 fasilitas SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan 40 fasilitas SMA (Sekolah Menengah Atas). Distribusi ini menunjukkan bahwa Jagakarsa memiliki akses yang relatif merata terhadap pendidikan di semua tingkatan, meskipun fokus utama tetap pada pendidikan dasar.

Sebaliknya, Mampang Prapatan memiliki jumlah fasilitas pendidikan paling sedikit di antara kecamatan-kecamatan lain di Jakarta Selatan, dengan total 68 fasilitas. Dari jumlah ini, 40 fasilitas merupakan SD dan sederajat, sementara fasilitas SMP berjumlah 18, dan fasilitas SMA berjumlah 10. Ketimpangan jumlah fasilitas ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan di Mampang

Prapatan mungkin lebih terbatas, terutama di tingkat pendidikan menengah dan atas. Akibatnya, siswa mungkin menghadapi tantangan dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai.



Gambar 4. 9 Sebaran Fasilitas Pendidikan di Jakarta Selatan
 Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Perbedaan antara kedua kecamatan ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi fasilitas pendidikan yang ada di Jakarta Selatan. Kecamatan seperti Jagakarsa memiliki keunggulan dalam jumlah fasilitas yang cukup di setiap tingkatan, sementara kecamatan dengan jumlah fasilitas yang lebih rendah, seperti Mampang Prapatan, membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi warganya. Pemerataan fasilitas pendidikan yang lebih baik dapat membantu memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari tempat

tinggal mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

IV.6.3 Sebaran Fasilitas Niaga di Kota Jakarta Selatan

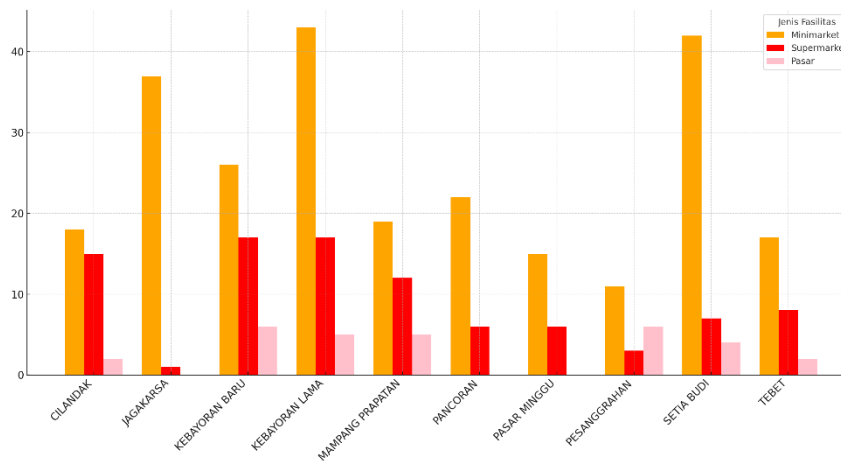
Sebaran fasilitas niaga di suatu daerah memiliki peran krusial dalam menentukan kemudahan dan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok. Pemetaan distribusi ini bertujuan untuk memahami penyebaran fasilitas seperti supermarket, minimarket, dan pasar di berbagai wilayah, serta bagaimana keberadaannya dapat memengaruhi aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan mengetahui pola sebaran fasilitas niaga, potensi kesenjangan layanan di berbagai wilayah dapat diidentifikasi, serta langkah-langkah perencanaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemerataan akses dapat dirancang. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam akses fasilitas niaga, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja.

Tabel 4. 7 Distribusi Fasilitas Niaga di Jakarta Selatan

Kecamatan	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas
Cilandak	Minimarket	18
	Supermarket	15
	Pasar	2
Jagakarsa	Minimarket	37
	Supermarket	1
Kebayoran Baru	Minimarket	26
	Supermarket	17
	Pasar	6
Kebayoran Lama	Minimarket	43
	Supermarket	17
	Pasar	5
Mampang Prapatan	Minimarket	19
	Supermarket	12
	Pasar	5
Pancoran	Minimarket	22
	Supermarket	6
Pasar Minggu	Minimarket	15
	Supermarket	6

Kecamatan	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas
Pesanggrahan	Minimarket	11
	Supermarket	3
	Pasar	6
Setia Budi	Minimarket	42
	Supermarket	7
	Pasar	4
Tebet	Minimarket	17
	Supermarket	8
	Pasar	2

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023



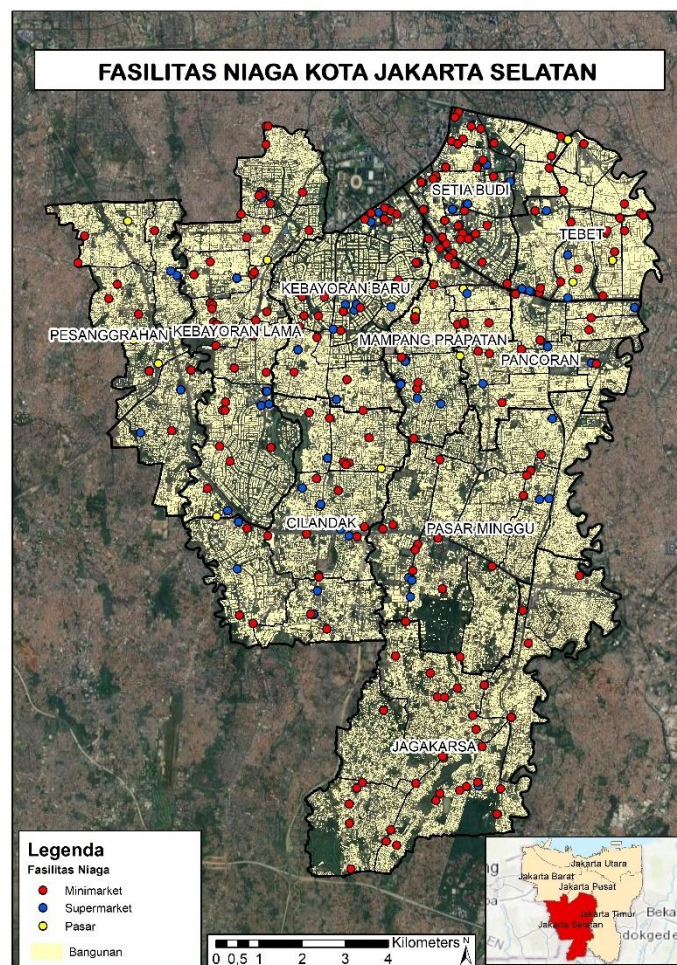
Gambar 4. 10 Grafik Distribusi Fasilitas Niaga di Jakarta Selatan

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan data sebaran fasilitas niaga di Jakarta Selatan, Kebayoran Lama menjadi kecamatan dengan jumlah fasilitas terbanyak, terdiri dari 43 minimarket, 17 supermarket, dan 5 pasar. Dominasi minimarket menunjukkan bahwa masyarakat di Kebayoran Lama memiliki akses yang baik terhadap kebutuhan sehari-hari, terutama melalui sektor ritel yang cepat dan mudah dijangkau. Di sisi lain, jumlah pasar tradisional yang lebih sedikit dibandingkan minimarket dan supermarket mungkin mencerminkan perubahan preferensi masyarakat atau kebutuhan yang lebih tinggi akan layanan ritel modern.

Sebaliknya, Pesanggrahan memiliki jumlah fasilitas niaga yang lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya, dengan 11 minimarket, 3 supermarket, dan 6

pasar. Jumlah yang lebih kecil ini menunjukkan tantangan bagi masyarakat setempat dalam mengakses barang kebutuhan sehari-hari, terutama jika ada permintaan yang tinggi. Namun, keseimbangan antara pasar tradisional dan fasilitas modern di Pesanggrahan menunjukkan peran penting pasar tradisional dalam perekonomian setempat, meskipun aksesnya tetap lebih terbatas dibandingkan kecamatan dengan jumlah fasilitas yang lebih besar.



Gambar 4. 11 Sebaran Fasilitas Niaga di Jakarta Selatan
 Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi fasilitas niaga di Jakarta Selatan. Kecamatan seperti Kebayoran Lama, yang memiliki banyak fasilitas modern, memberikan kemudahan dan akses cepat bagi warganya. Sebaliknya, kecamatan seperti Pesanggrahan mungkin memerlukan peningkatan fasilitas untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Selain

itu, penting untuk memperhatikan pasar tradisional yang dapat berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah dengan akses terbatas terhadap fasilitas modern.

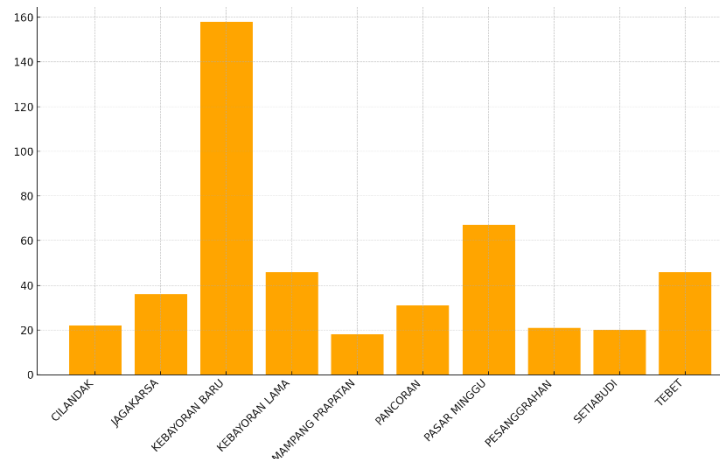
IV.6.4 Sebaran Taman di Kota Jakarta Selatan

Sebaran fasilitas taman di suatu wilayah memiliki peran penting dalam menyediakan ruang hijau yang bermanfaat bagi masyarakat, baik untuk aktivitas rekreasi, olahraga, maupun peningkatan kualitas lingkungan. Pemetaan distribusi taman bertujuan untuk memahami bagaimana taman-taman ini tersebar di berbagai kecamatan dan bagaimana kehadirannya memengaruhi akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau. Dengan memetakan pola sebaran taman, potensi kesenjangan akses terhadap fasilitas ini dapat diidentifikasi, sehingga langkah perencanaan yang diperlukan untuk meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas dapat dirumuskan. Tujuan dari upaya ini adalah menciptakan kesetaraan dalam akses ruang hijau yang dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4. 8 Distribusi Taman di Jakarta Selatan

Kecamatan	Jumlah Taman
Cilandak	22
Jagakarsa	36
Kebayoran Baru	158
Kebayoran Lama	46
Mampang Prapatan	18
Pancoran	31
Pasar Minggu	67
Pesanggrahan	21
Setiabudi	20
Tebet	46

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023



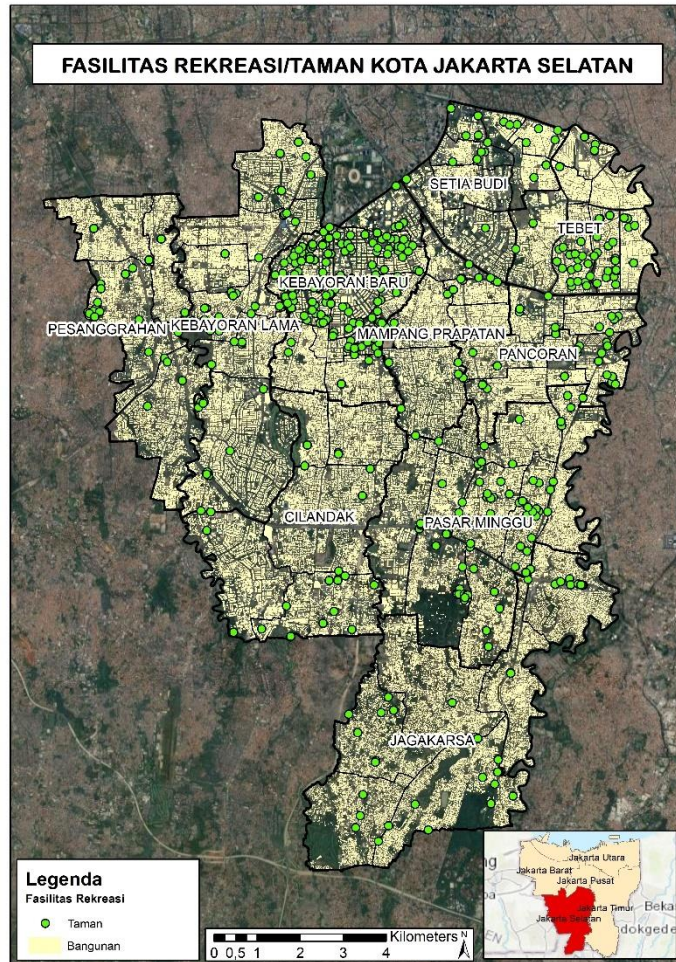
Gambar 4. 12 Grafik Distribusi Taman di Jakarta Selatan
 Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan data sebaran taman di Jakarta Selatan, Kebayoran Baru memiliki jumlah taman terbanyak, yaitu 158 taman. Banyaknya taman di daerah ini memberikan akses yang baik bagi masyarakat untuk menikmati ruang hijau, baik untuk bersantai, berolahraga, maupun berkumpul. Keberadaan taman-taman ini mendukung kenyamanan hidup warga dan mencerminkan upaya yang serius dalam menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan tersebut.

Sebaliknya, Mampang Prapatan memiliki jumlah taman yang jauh lebih sedikit, hanya 18 taman. Jumlah ini menunjukkan bahwa masyarakat di Mampang Prapatan mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses ruang hijau. Minimnya taman dapat mengurangi pilihan warga untuk beraktivitas di luar ruangan atau sekadar bersantai di lingkungan hijau. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih untuk menambah dan meningkatkan kualitas taman di daerah ini demi kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan jumlah taman ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi fasilitas ruang hijau di Jakarta Selatan. Daerah seperti Kebayoran Baru yang memiliki banyak taman memberikan manfaat besar bagi warganya. Sementara itu, wilayah dengan jumlah taman yang lebih sedikit, seperti Mampang Prapatan, perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan akses masyarakat ke taman. Dengan pemerataan jumlah taman di seluruh wilayah, diharapkan setiap warga

bisa menikmati manfaat ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.

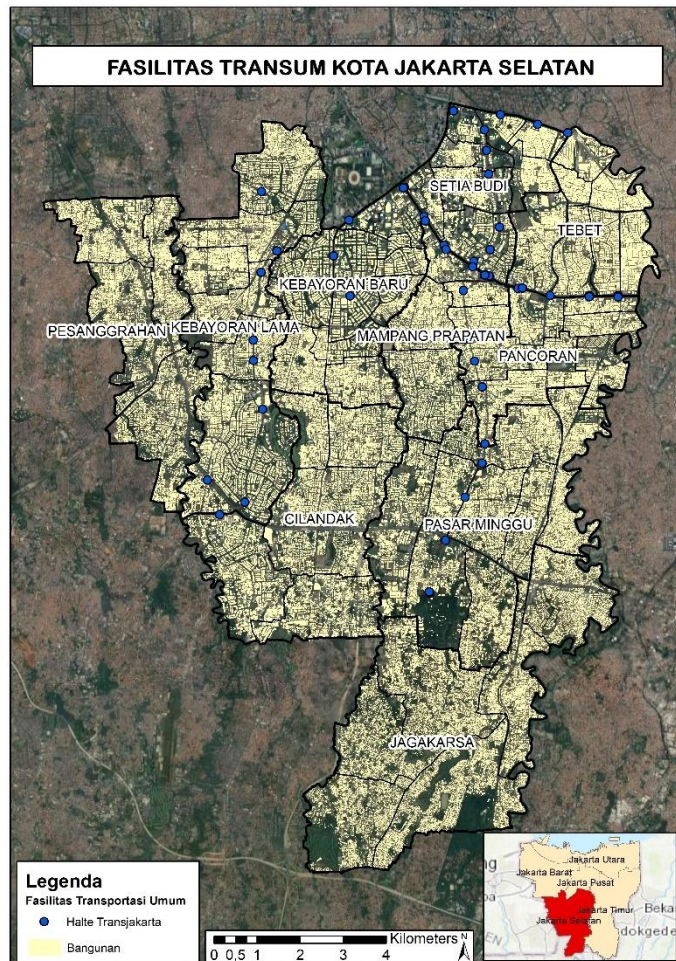


Gambar 4. 13 Sebaran Taman di Jakarta Selatan
Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

IV.6.5 Sebaran Fasilitas Transportasi Umum di Kota Jakarta Selatan

Sebaran fasilitas transportasi umum di suatu wilayah berperan penting dalam mempermudah mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Dengan memetakan distribusi fasilitas seperti halte bus, stasiun kereta, dan terminal angkutan umum, dapat dipahami bagaimana akses terhadap layanan transportasi ini tersebar di berbagai daerah serta dampaknya pada mobilitas masyarakat. Pola distribusi yang diketahui memungkinkan identifikasi potensi kesenjangan akses di wilayah tertentu, sehingga langkah-langkah perencanaan yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan pemerataan akses transportasi. Tujuannya adalah menciptakan

kesetaraan dalam layanan transportasi umum, yang berkontribusi pada kemudahan mobilitas, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kenyamanan serta efisiensi perjalanan masyarakat.



Gambar 4. 14 Sebaran Halte Transjakarta di Jakarta Selatan
 Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan peta yang tersedia, terlihat bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang belum sepenuhnya dilayani oleh transportasi umum, khususnya TransJakarta. Kecamatan seperti Pesanggrahan, Jagakarsa, dan Cilandak menjadi contoh wilayah yang minim akses terhadap layanan ini. Sebaliknya, sebaran halte TransJakarta cenderung terpusat di sepanjang ruas jalan utama yang melintasi kecamatan Tebet dan Setiabudi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses transportasi umum yang perlu mendapat perhatian. Keterbatasan akses bagi masyarakat di wilayah seperti Pesanggrahan, Jagakarsa, dan Cilandak

dapat mempersulit mobilitas harian mereka dan menambah ketergantungan pada transportasi pribadi.

IV.7 Sebaran Permukiman Kumuh di Kota Jakarta Selatan

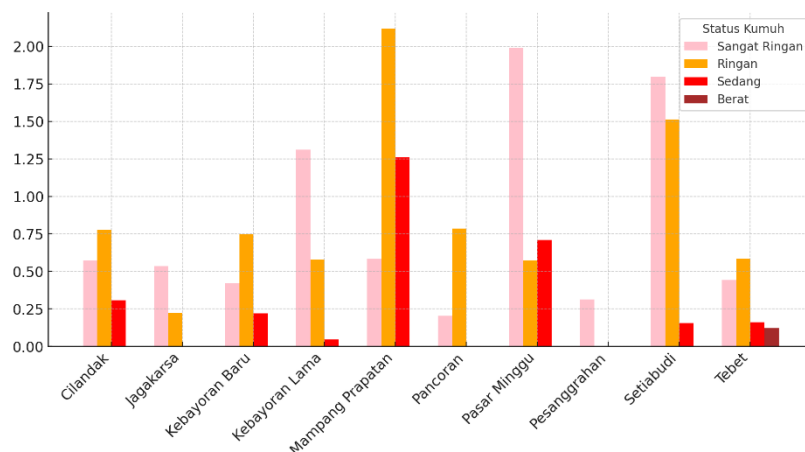
Identifikasi sebaran permukiman kumuh menjadi langkah awal yang penting dalam upaya memahami tantangan yang dihadapi masyarakat miskin di suatu wilayah. Permukiman kumuh sering kali mencerminkan tingkat kesejahteraan yang rendah, kurangnya akses terhadap fasilitas dasar, serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi. Selain itu, dengan mengidentifikasi permukiman kumuh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai wilayah-wilayah yang memerlukan intervensi lebih mendalam dari segi perencanaan infrastruktur dan distribusi fasilitas. Data ini juga penting untuk merekomendasikan kebijakan yang lebih inklusif, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah permukiman kumuh, dapat memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas publik sesuai dengan konsep 15-minute city. Identifikasi ini juga dapat membantu menyoroti area yang memerlukan prioritas dalam perbaikan infrastruktur dan distribusi layanan publik guna mencapai mobilitas berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. 9 Luas Permukiman Kumuh di Jakarta Selatan

Kecamatan	Status Kumuh	Luas (Ha)
Cilandak	Sangat Ringan	57,100043
	Ringan	77,704094
	Sedang	30,758195
Jagakarsa	Sangat Ringan	53,436090
	Ringan	22,176617
Kebayoran Baru	Sangat Ringan	42,254792
	Ringan	74,8577,02
	Sedang	22,0258,99
Kebayoran Lama	Sangat Ringan	130,982327
	Ringan	57,570462
	Sedang	4,518086
Mampang Prapatan	Sangat Ringan	58,345280
	Ringan	211,8136,11
	Sedang	125,912217

Kecamatan	Status Kumuh	Luas (Ha)
Pancoran	Sangat Ringan	20,403201
	Ringan	78,475765
	Sedang	0,457107
Pasar Minggu	Sangat Ringan	198,786522
	Ringan	57,554646
	Sedang	71,007973
Pesanggrahan	Sangat Ringan	31,234530
Setiabudi	Sangat Ringan	179,694223
	Ringan	151,2879,33
	Sedang	15,448386
	Berat	0,021098
Tebet	Sangat Ringan	44,354832
	Ringan	58,615256
	Sedang	16,105284
	Berat	12,044545

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2024



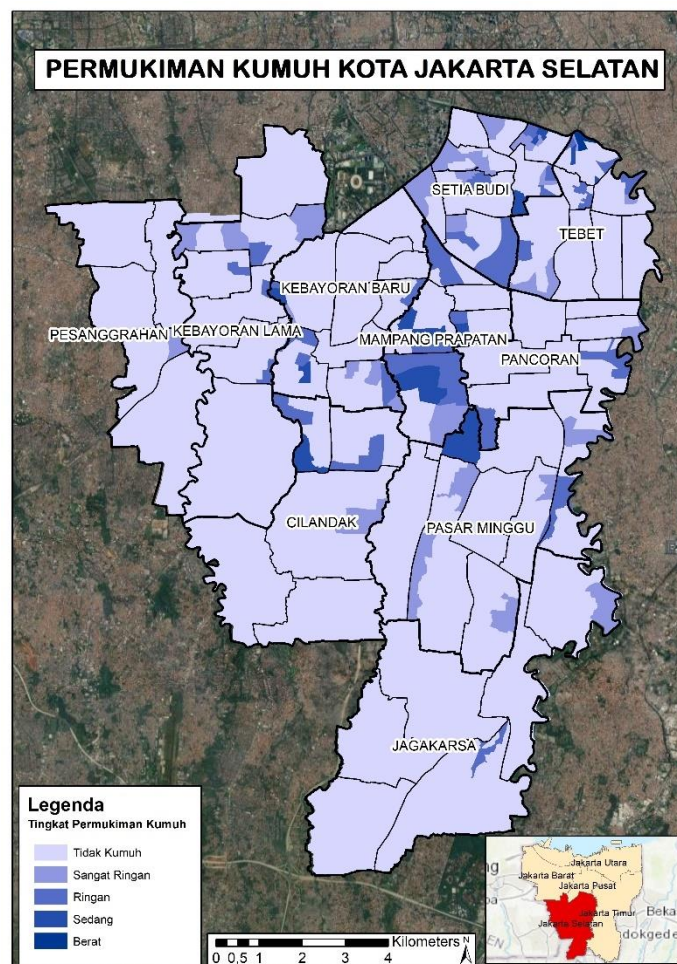
Gambar 4. 15 Grafik Distribusi Luas Permukiman Kumuh di Jakarta Selatan

Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2024

Berdasarkan data sebaran area permukiman kumuh di Jakarta Selatan, Setiabudi menjadi kecamatan dengan area kumuh paling luas. Area ini terbagi ke dalam berbagai kategori, mulai dari "sangat ringan" seluas 179,69 hektar, "ringan" seluas 151,29 hektar, hingga "sedang" seluas 15,45 hektar, dan "berat" dengan luas 0,021 hektar. Luasnya area kumuh di Setiabudi menunjukkan bahwa masih banyak warga di wilayah ini yang hidup dalam kondisi yang kurang layak. Permukiman kumuh ini juga mencerminkan sebaran masyarakat berpenghasilan rendah, yang

memerlukan perhatian khusus untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.

Sebaliknya, Pesanggrahan memiliki area permukiman kumuh yang jauh lebih kecil dibandingkan kecamatan lain, yaitu hanya 31,23 pada kategori "sangat ringan", dan tidak ada area kumuh di kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Pesanggrahan secara umum hidup dalam kondisi yang lebih baik, meskipun masih ada kelompok kecil yang hidup di permukiman dengan kondisi kurang ideal. Keberadaan area "sangat ringan" ini tetap memerlukan perhatian untuk memastikan kondisi tidak memburuk dan warga di sana tetap mendapatkan akses yang layak.



Gambar 4. 16 Permukiman Kumuh di Jakarta Selatan
Sumber : Hasil Olah Data dari Open Data DKI Jakarta, 2024

Perbedaan ini menunjukkan bahwa distribusi masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta Selatan tidak merata. Kecamatan seperti Setiabudi membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan kondisi permukiman dan mendukung warganya agar dapat hidup lebih sejahtera. Sementara itu, Pesanggrahan bisa menjadi contoh wilayah dengan kondisi yang relatif lebih baik, meskipun tetap penting untuk mencegah masalah yang lebih besar di masa depan. Permukiman kumuh bukan hanya masalah fisik, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang perlu diatasi melalui perbaikan infrastruktur dan program-program pemberdayaan masyarakat.